

MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Eko Punto Hendro Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Diponegoro

Abstrak

The politics of ethnic assimilation and discrimination, especially one which was directed toward Tionghoa ethnic during the Old Order as well as the New Order, has resulted in social conflicts which threatens the process of national integration. Multiculturalism approach is a strategic offer to support the emergence of new social institutions to support the effort of developing civil society in Indonesia. Through the multiculturalism approach, recent stereotypical views, which have triggered conflicts, can be eliminated and the existence of Tionghoa ethnic group, including their presence as citizens, can be appreciated and respected. In that manner, the conflicts can be eliminated and altered into a mutualistic-symbiosist relation,

Keywords: *assimilation, multiculturalism, civil society*

1, Pendahuluan

Tragedi Mei 1998 di Jakarta merupakan bencana yang mungkin sulit dilupakan oleh warga Indonesia keturunan etnis Tionghoa. Peristiwa yang menyebabkan ratusan warga keturunan etnis Tionghoa meninggalkan Jakarta itu merupakan bukti ketidakharmonisan hubungan antaretnis di balik jargon-jargon keberhasilan proses pembauran dan keharmonisan hubungan antaretnis. Program-program pemerintah Orde Baru yang menekankan pada stabilitas dan keamanan memang cukup efektif selama 32 tahun, tetapi ternyata "semu" sebab justru akibatnya sekarang cukup luar biasa, memporak porandakan tatanan yang sudah mapan. Orde Baru tampaknya menerapkan standar ganda dalam masalah ini. Di satu sisi pengembangan keragaman budaya, agama, dan semua yang tergolong dalam SARA menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain justru keragaman itu sering dicurigai sebagai salah satu faktor yang mengancam stabilitas nasional; yang muncul sebagai akibat dari pendekatan politik yang berlebihan, dan akibatnya ternyata tidak terduga sama sekali. Tidak hanya masalah etnis Tionghoa, tetapi

ternyata rentetan kejadian berikutnya seperti peristiwa Sambas, Ambon, dan Sampit merupakan akibat dari kebijakan yang salah itu.

Kompas (14 Maret 2001) pernah menulis bahwa semasa Orde Baru potensi konflik SARA tidak boleh kelihatan dan memang disembunyikan di balik karpet "persatuan dan kesatuan". Bahkan kata SARA saja cukup ampuh untuk menyeret orang-orang ke penjara atas tuduhan subversi "memecah-belah", mengancam persatuan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, dan sebagainya. Semua itu membuat Orde Baru dari luar tampak ibarat rumah yang kokoh, tetapi sebenarnya "rayap" bemama SARA itu terus berkembang biak dengan subur dengan ketidakpuasan politik, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan yang kemudian menggerogoti tiang-tiang penyangga dan membuat rumah itu rapuh dan potensial untuk roboh.

Dalam kaitan dengan etnis Tionghoa dalam koridor SARA dan isu pembauran, mereka ternyata mendapat tekanan yang cukup berlebihan dibandingkan dengan etnis-etnis lain di Indonesia. Demikian kuat tekanan yang bermuatan politis, yang dikaitkan dengan isu Komunisme dan negara RRC, maka golongan

etnis ini akhirnya menjadi cukup eksklusif. Dengan kekuatan sistem ekonominya yang tersisa (karena potensi sosial budaya dibekukan), akhirnya mereka masih mampu eksis di tengah masyarakat dan sering memunculkan kecemburuan sosial yang potensial untuk konflik. Persoalan pembauran di sini diletakkan pada posisi yang salah, sehingga hanya menghasilkan orang-orang Tionghoa yang berstandar ganda. **Di** satu sisi, misalnya dengan mengubah nama dan penampilannya, mereka seolah-olah akoniodatif terhadap program pembauran tersebut. Namun di sisi lain, perilaku mereka justru berpotensi konflik dengan etnis lainnya. Setelah konflik itu benar-benar terjadi mereka lalu mengeluh bahwa selama ini ternyata hanya dijadikan sapi perah oleh oknum-oknum yang berkedok pemerintah.

Isu keseragaman yang digulirkan oleh pemerintah Orde Baru pada masa lalu telah melahirkan konsep pembauran (asimilasi) untuk menangani keanekaragaman etnis di Indonesia. Dengan konsep itu diasumsikan dan diharapkan perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing kelompok etnis itu dapat dieliminasi untuk menunjang program stabilitas nasional maupun persatuan dan kesatuan bangsa. Ternyata program ini hasilnya hanya "semu". hanya mampu bertahan selama 32 tahun dan akibatnya kemudian malah melahirkan konflik etnis yang berkepanjangan seperti tragedi Mei 1998, Sambas, Sampit, dan Ambon, yang justru dapat mengarah pada disintegrasi nasional. Kejadian ini karena di satu sisi pemerintah Orde Baru menerapkan politik asimilasi, tetapi di sisi yang lain juga menerapkan politik diskriminasi dan secara diam-diam berpihak pada mayoritas atau dengan kamufilasnya berpihak pada yang kuat. Semua hal di atas tentu dapat kita lihat bersama sebagai sebuah pelajaran yang amat berharga dan tentu supayajangan terulang lagi, walaupun kita sekarang cukup pusing menghadapi masalah yang merebak tersebut Masalah proses difusi, akulturasi ataupun asimilasi sekalipun tentu tidak dapat dipaksakan, paling-paling kita hanya dapat menyiapkan sarana ataupun prasarana untuk menjembatani agar proses-proses sosial budaya

itu dapat berlangsung dengan baik. **Hal** ini karena masalah etnisitas mempunyai sifat etnosentrisme yang dapat memunculkan pandangan stereotipe dan bentuk-bentuk konservatif. Kalau sudah demikian **maka** mustahil proses-proses akulturasi ataupun asimilasi dapat berlangsung dengan baik, dan justru kamufilase-kamuftase dan konflik-konflik yang akan muncul yang dapat mengarah pada konflik besar. Untuk mewujudkan proses integrasi nasional yang permanen, pemerintah harus dapat mendorong terjadinya proses perubahan sosial budaya yang positif, yaitu sedikit demi sedikit harus dapat membuka sifat-sifat etnis yang cenderung konservatif dan tertutup itu untuk dapat saling berkomunikasi dengan baik. Masing-masing kelompok etnis harus dapat menyadari betul tentang adanya perubahan sosial budaya; bahwa mereka sekarang telah berada pada suatu kelompok yang merupakan bagian **dari** kelompok yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Oleh karena itu, bentuk-bentuk perilaku yang konservatif **dan eksklusif itu** memang harus ditinggalkan,

Memang untuk suatu identitas dan kelangsungan adaptasi sosial budaya, sebuah kebudayaan masyarakat harus dikonservasi. Namun yang lebih penting untuk pergaulan nasional dan internasional adalah kebudayaan itu harus dikembangkan dan dikomunikasikan. Dewasa ini banyak didirikan pusat-pusat (pelestarian) kebudayaan, misalnya pusat kebudayaan Betawi, pusat kebudayaan **Jawa**, pusat kebudayaan Batak, Asmat, dan sebagainya yang masih perlu ditambah lagi untuk membentuk pemik-pemik kebudayaan nasional. Hal yang tidak kalah penting adalah pusat-pusat kebudayaan itu harus dapat berfungsi menjembatani komunikasi sosial kebudayaan secara nasional; dan bukan sebaliknya, dengan sifat konservatifnya sehingga dapat memicu konflik.

2. Komunikasi Multikulturalisme

Sejalan dengan proses reformasi **dan** sejalan dengan bergulimya demokrasi politik dan penegakan HAM menuju pada suatu bentuk masyarakat madani (*civil society*), proses akulturasi dan asimilasi **tentu**

Sabda, Volume 8, Tahun 2013: 34-42

diharapkan dapat terjembatani dengan baik. Dengan demikian proses integrasi nasional juga dapat terwujud dengan **baik** dan **lebih** permanen.

Mengutip dari harian *Kompas* (14 Maret 2001) yang menyitir pendapat berbagai ahli yang sudah diterapkan di beberapa negara, barangkali pendekatan multikulturalisme cocok diterapkan pada masyarakat yang multietnis seperti Indonesia. Artinya, pemerintah pusat maupun daerah harus menjembatani berkembangnya kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang beraneka ragam ini dan menyiapkan media agar setiap kebudayaan yang berkembang itu dapat berkomunikasi dengan baik. Di sini pemerintah harus bisamengembangkan politik kebudayaan yang arif, menyediakan sarana dan prasarana yang kondusif, misalnya melalui himbauan moral dan dorongan atau dalam bentuk peraturan perundangan yang kondusif agar kebudayaan-kebudayaan masyarakat dapat berkembang dengan baik, komunikatif, dan tidak konservatif-tertutup.

Sebagai contoh apa yang terjadi pada penerapan politik apartheid di Afrika Selatan atau politik diskriminatif di Amerika Latin yang mengecilkan peran bahkan memusnahkan etnis minoritas, tidak terjadi di Indonesia, sebab hal ini dapat dikategorikan melanggar HAM. Tetapi justru keanekaragaman etnis dapat dijadikan potensi dan pernik-pernik kebudayaan nasional, yang pada akhirnya akan membentuk etos budaya dan etos kerja untuk menuju masyarakat madani yang maju. Dengan perkembangan kebudayaan-kebudayaan yang komunikatif diharapkan dapat tumbuh persaingan yang sehat antaretnis, yang memungkinkan tumbuh dengan sendirinya proses akulturasi dan asimilasi.

Berbeda dari pendekatan asimilasi dan diskriminasi, tawaran pendekatan multikulturalisme akan mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural setiap kelompok etnis. Dalam pandangan ini baik individu maupun kelompok dari berbagai etnis dapat bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan

identitas etnis dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka **untuk** berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat.

Pendekatan multikulturalisme **oleh** UNESCO menyatakan bahwa keanekaragaman budaya ada di belakang, di depan, dan **di** sekeliling kita. Satu-satunya kebutuhan kita adalah bagaimana membuat semua (keberagaman) ini memberikan sumbangan yang paling berhargabagi semua orang.

Pendekatan multikulturalisme **yang** dilontarkan oleh beberapa ahli relatif **masih** merupakan wacana yang baru, dan karena **itu** masih banyak pula kritik-kritik terhadapnya, antara lain dikhawatirkan bahwa wacana multikulturalisme ini potensial mendorong konflik sosial dengan berlandung pada kebenaran politik. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan kesatuan bangsa ataupun menanggapi proses globalisasi, maka dengan pendekatan multikulturalisme negara harus banyak berperan dengan beaya dan kemauan yang cukup besar agar pendekatan ini **efektif**, Sebenarnya, Indonesia, khususnya pada masa Presiden Abdulrahman Wahid, cukup **kondusif** untuk mengembangkan pendekatan multikulturalisme. Hal ini karena sifat presiden yang cukup toleran, inklusif, dan banyak berpihak pada kelompok minoritas. Namun kondisinya banyak terhapus oleh **sisi** negatifnya yang banyak menghiasi **media** massa. Program transmigrasi yang selama **ini** dijalankan oleh pemerintah Indonesia kiranya perlu dikaji ulang, sebab selama ini hanya dilandaskan pada faktor kependudukan **dan** kemiskinan khususnya di Jawa, Madura, dan Bali, Proses-proses sosial budaya di daerah transmigrasi belum mendapat perhatian, sehingga konflik juga sering terjadi di **daerah** itu.

Perkembangan politik, ekonomi, agama-agama, dan pengaruh asing (modernisasi) serta kompleksitas perkembangan masyarakat **ke** arah *civil society* di Indonesia yang melewati batas-batas etnis, kiranya berpotensi **positif** dapat mendorong hubungan antarkelompok etnis yang sangat kondusif untuk pendekatan multikulturalisme. Justru masing-masing

proses tersebut dapat saling mendorong untuk mengeliminasi konflik-konflik sosial yang muncul dari proses-proses itu. Persoalan di Indonesia adalah demokrasi yang belum selesai, *civil society* masih sangat lemah, dan modernisasi belum berjalan mulus, Hal ini tentu saja merupakan titik-titik lemah bagi program multikulturalisme yang justru dapat digunakan untuk komoditas politik bagi oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.

3. Kasus Etnis Tionghoa

Pihak yang tampaknya paling merasakan dampak dari adanya program pembauran yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru di masa lampau adalah kelompok etnis Tionghoa. Salah satu akibat cukup fatal yang terjadi pada program pembauran yang tidak dapat berjalan mulus karena sarat dengan muatan politis itu adalah peristiwa pada sekitar Mei 1998 yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda khususnya bagi kelompok etnis Tionghoa.

Siapakah sebenarnya orang Tionghoa di Indonesia itu? Pertanyaan sederhana ini tidak mungkin bisa dijawab secara gegabah. Hal yang jelas bisa dipastikan adalah bahwa mereka sudah sangat berbeda dari orang-orang Tionghoa yang ada di daratan Cina, Jauh sebelum abad ke-20, orang Tionghoa yang datang di bumi Nusantara telah mengasimilasikan diri dengan penduduk asli. Bahkan, pernah terjadi pada suatu periode mereka melebur dalam kehidupan penduduk asli, sehingga ciri-ciri mereka hilang sama sekali dan mereka larut menyatu dengan kebudayaan penduduk asli (Coppel, 1994:37). Kala itu mereka yang datang kebanyakan laki-laki dan kemudian menikah dengan wanita pribumi dari kalangan muslim. Keturunan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Cina Tionghoa peranakan (Suryadinata, 1994: 20), yang semestinya dibedakan dari Cina Totok. Ciri-ciri kaum Peranakan ini dapat dengan mudah dibedakan dari Cina Totok dari bahasa yang mereka gunakan, Kaum Peranakan umumnya menggunakan bahasa daerah (Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) sebagai bahasa utama, sedangkan kaum Totok menggunakan

Sabda, Volume Q, Tahun 2013: 34-42

bahasa Cina menurut sukunya, seperti Hokian, Tio Ciu, Hakka, Kanton, Hinghua, Hoklo, dan Hainan.

Masalah Tionghoa pada hakikatnya bukanlah monopoli negara Indonesia. Akan tetapi, dibandingkan dengan kejadian di negeri-negeri Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya, apa yang dialami oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia tergolong yang paling luar biasa. Berbagai tindak diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa telah dilakukan oleh pemerintah sejak masa kolonial hingga sekarang.

Di masa kolonial ada Undang-Undang Agraria (1870) yang melarang orang asing (termasuk Cina) bergerak di bidang pertanian. Puncak tragedi orang-orang Tionghoa di Indonesia terjadi dalam pembantaian orang Cina oleh Kompeni VOC pada tahun 1740 di Batavia, yang kemudian meluas menjadi Geger Pacinan atau Perang Cina di Jawa. Sementara itu perubahan situasi di Cina Daratan juga berpengaruh terhadap sikap dan orientasi orang Cina di Indonesia. Kebangkitan Nasional di Cina Daratan pada awal abad ke-20 telah mendorong munculnya perkumpulan Tionghoa Hwee Koan (THHK) pada 17 Maret 1900, disusul dengan berdirinya sekolah-sekolah dasar Tionghoa dengan sistem modern dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Mandarin. Lembaga-lembaga ini ternyata efektif untuk "men-Cina-kan kembali" orang-orang yang disebut Cina Peranakan (Tan Swee Ling, 2000; 3).

Di sisi lain, pengisolasian pemukiman orang Tionghoa oleh pihak kolonial, sehingga terbentuk kampung-kampung Cina atau Pecinan (*China Town*), ditambah dengan stratifikasi sosial versi kolonial yang membagi masyarakat menjadi tiga kelas yaitu kelas satu untuk orang Eropa, kelas dua untuk orang-orang Timur Asing (termasuk Tionghoa) dan pribumi sebagai kelas terendah, barangkali juga menjadi salah satu faktor penyebab munculnya disintegrasi dan konflik-konflik sosial di masa-masa kemudian.

Setelah Indonesia merdeka, sikap diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa tampaknya masih terus berjalan. Hal ini terlihat antara lain dari adanya persetujuan antara

Sabda, Volume 8, Tahun 2013; 34-42

Menteri Luar Negeri RRC Chou En Lai dan Menteri Luar Negeri RI Soenaryo mengenai penghapusan dwikewarganegaraan, PPNo. 10 tahun 1959 tentang larangan orang Tionghoa asing berusaha di luar ibukota kabupaten, dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang "asimilasionis" dengan tujuan utama untuk mengurangi penggunaan bahasa Cina. Contoh lain ialah peraturan KASAD pada April 1958 yang menutup semua surat kabar yang terbit dengan huruf selain huruf Latin dan Arab, larangan/pembatasan penggunaan bahasa Cina di tempat-tempat terbuka, dan mendesak WNI keturunan untuk tidak lagi menggunakan bahasa Cina. Di masa Orde Baru bahkan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 1967 yang intinya mengatur bahwa agama dan adat istiadat Tionghoa hanya dapat dijalankan di lingkungan keluarga. Perayaan hari-hari besar keagamaan dan adat, walaupun akan dilaksanakan secara terbuka, tidak boleh dilakukan secara mencolok. Hal itu diatur oleh Departemen Agama dan Jaksa Agung, Baru dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1969, agama Buddha dan Konghucu memperoleh status resmi walaupun dalam praktik tetap diberlakukan berbagai pembatasan. Masalah lain yang berbaur diskriminatif misalnya larangan terhadap iklan dengan tulisan Mandarin, film berbahasa Mandarin, dan peraturan tentang perubahan nama yang diberlakukan sejak Desember 1966.

Di awal kemerdekaan, keberadaan orang Tionghoa secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Pertama, adalah kelompok yang berorientasi ke Indonesia. Dari kelompok ini banyak tokoh yang begitu gigih memperjuangkan terbentuknya *nation and character building* di Indonesia. Kedua, kelompok yang berorientasi ke Tiongkok. Di antara mereka ada sekitar 40.000 orang Tionghoa yang pada tahun 1949 menolak tawaran kewarganegaraan pemerintah RI dan memilih pulang ke negeri leluhur. Ketiga, adalah kelompok Tionghoa yang berorientasi ke Barat (Greif, 1991:11).

Walaupun pada saat ini sudah sulit untuk menemukan orang Tionghoa Indonesia yang masih merasa bukan sebagai orang Indonesia,

kenyataannya keraguan etnis lain, khususnya kaum pribumi terhadap kenasionalan orang-orang Tionghoa belum jugahilang. Sebaliknya, dikotomi antara pribumi dan nonpribumi telah menjadi komoditas yang sangat baik bagi isu-isu SARA di masa pemerintahan Orde Baru.

Banyak upaya telah dilakukan baik oleh tokoh-tokoh pribumi ataupun sebaliknya dari kalangan nonpribumi untuk membuktikan kesungguhan ke-Indonesia-an orang-orang Tionghoa, namun hal itu tampaknya belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Kondisi itu semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang dalam praktik menciptakan standar ganda terhadap orang-orang Tionghoa. Di satu sisi, khususnya di sektor ekonomi, orang-orang Tionghoa diberi peluang yang sebenarnya tidak lain juga demi kepentingan penguasa. Di sisi lain, secara politis dan kultural mereka ditekan. Kebijakan itu berdampak pada munculnya perbedaan soal ekonomi yang begitu mencolok antara pribumi dan nonpribumi, yang akhirnya bermula pada munculnya kecemburuan sosial dan isu SARA dan berpuncak pada tragedi Mei 1998.

Menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, bagaimana sebenarnya keberadaan orang-orang Tionghoa di tengah-tengah masyarakat Brakat Indonesia? Apakah peraturan yang diskriminatif dan standar ganda yang berlaku sejak zaman kolonial hingga Orde Baru masih tepat diberlakukan hingga sekarang atau mungkinkah dihapuskan seluruhnya? Tentunya semua itu memerlukan wacana pemikiran yang komprehensif. Sejalan dengan era keterbukaan di masa sekarang, peraturan yang diskriminatif itu seharusnya dihapuskan, namun yang penting memang harus ada peraturan umum yang melindungi golongan yang terpinggirkan. Kenyataannya, selama ini orang-orang Tionghoa selalu menjadi korban kebijakan-kebijakan yang keliru. Masalah inilah yang mendasari ide untuk mereposisi keberadaan etnis Tionghoa dalam proses integrasi nasional yang mungkin dapat dilakukan melalui pendekatan multikulturalisme.

Begitu pelik dan rumit persoalan etnis Tionghoa di Indonesia, sehingga tidak

mengherankan ketika pada tahun **1991** di Cornell University berlangsung simposium dengan tema "*The Role of the Indonesian Chinese in Shaping Modern Indonesian Life*". muncul pernyataan ini:

The culture identity and the position of the Chinese population group within Indonesian society is a contention one. The 'masalah Cina' (Chinese problem) issue has been hotly discussed within Indonesia society itself and has inevitably resulted in such crucial question as whether the Indonesian Chinese are intuted their own culture identity or should instead seek integration or even assimilation into Indonesian culture.

Di era Indonesia Baru sekarang, ketika pemerintah jelas sedang gigih mengupayakan agar republik ini menjadi negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, berkeadilan, demokratis, peduli terhadap HAM, dan menyikapi perbedaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kebijakan terhadap etnis Tionghoa tampaknya perlu ditinjau kembali, Terbitnya Keppres No. 6 tahun 2000 dan Undang-Undang RI No. 6 tahun 2006 merupakan angin segar bagi orang-orang Tionghoa yang selama era Orde Baru secara fisik maupun psikis telah menderita karena dijauhkan dari segala anasir yang berhulu pada budaya leluhur mereka. Kebijakan itu diharapkan dapat membuat Naga Nusantara itu bangkitdaritidurpanjangnya, Dengan demikian era reformasi ini sesungguhnya lebih memberi peluang bagi semua pihak, tidak terkecuali etnis Tionghoa, untuk membuktikan diri sebagai pewaris sah republik tercinta. Akan tetapi, peluang baik ini tidak mustahil bisa menjadi hambatan proses integrasi terutama jika kiprah mereka salah langkah, sehingga muncul kesan bahwa orang Tionghoa Indonesia justru semakin eksklusif. Untuk itulah reposisi etnis Tionghoa di Era Indonesia Baru perlu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian agar upaya menyinergikan keanekaragaman polensi etnis dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Pada tahun 1960 Willmott telah menerbitkan hasil penelitiannya yang dilakukan antara tahun 1954-1955 **dengan**

Sabda, Volume 8, Tahun 2013 : 34-42

judul *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia*. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini. Masalahnya ialah masyarakat Tionghoa Semarang di tahun limapuluhan ini tentunya berbeda dari masyarakat Tionghoa Semarang pada masa kini. Di samping itu, masyarakat Tionghoa Semarang tidak bisa dianggap merepresentasikan seluruh orang Tionghoa **di** Indonesia. Mengingat kenyataan bahwa komunitas Tionghoa di Indonesia begitu majemuk, diperlukan upaya untuk memperoleh gambaran tentang mereka.

Sejalan dengan pernyataan Willmott bahwa di wilayah Asia Tenggara masyarakat Tionghoa terbentuk sejalan dengan **atau** berdasarkan pada bahasa utama mereka, Oetomo dalam disertasinya yang berjudul *The Chinese of Pasuruan: Their Language and Identity* (1987) menemukan tiga **tipe** masyarakat Tionghoa Indonesia berdasarkan penggunaan bahasa keakraban dan bahasa solidaritas sehari-hari mereka. Pertama, mereka yang menggunakan bahasa daerah, antara lain masyarakat Cina di **Jawa**, Madura, Sumatera Barat, Bali, dan Ujung Pandang. Kedua, mereka yang menggunakan bahasa Melayu lokal, misalnya orang Tionghoa yang tinggal di Jakarta, Manado, Kupang, dan Sorong. Ketiga, mereka yang menggunakan bahasa Cina, misalnya Hakka dan Tio Ciu **di** Kalimantan Barat, Hokian di Kepulauan **Riau**, dan Kreol dengan anasir dialek Cina **yang** mefionjol di Bangka dan Belitung. Mengingat besarnya fungsi bahasa sebagai penand* identitas atau kebanggaan komunitas dan pengaruh bahasa terhadap kebudayaan, pandangan, dan sikap hidup komunitas penuturnya, maka pemetaan etnis Tionghoa **di** Indonesia perlu dilakukan dalam hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci mengenai profil masyarakat Tionghoa Indonesia.

Penelitian yang termasuk mutakhir **telah** dilakukan oleh Debora Wiriadinata (1998), berjudul *Chinese Indonesian Dilemma: The Younger Generation of Chinese Indonesian, Search for Identity*. Penelitian ini dilakukan **di** empat **kota** besar yaitu Surabaya, **Bandar**

Sabda, Volume 8. Tahun 2013:34-42

Lampung, Bandung, dan Jakarta, dan **telah** menemukan dilema yang dihadapi **oleh** generasi muda Cina Indonesia. Sebagai orang Tionghoa Indonesia, mereka uinumnya mengaku kebingungan untuk memilih apakah akan tetap mempertahankan ciri kecinaan (ketumnan) mereka yang khas, atau harus meninggalkan samasekali semua yang diperoleh dari leluhur mereka dan sepenuhnya melebur ke dalam masyarakat mayornas. Di satu sisi niereka merasa bahwa sebagai WNI di tengah bangsa yang muluetnis ini kebudayaan dan hak politik mereka telah diingkari. Di sisi lain, mereka bangga sebagai orang Tionghoa, antara lain karena status ekonomi mereka yang tinggi sekalipun mereka tidak merasa terlindungi dari agresivitas kelompok mayoritas yang sewaktu-waktu dapat timbul.

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa mereka itu sebenarnya kuat, sebab berbagai tekanan yang mengecilkan atau meminggirkan mereka ditanggapi dengan penuh perjuangan sehingga mereka tampak semakin lebih kuat dan tidak merasa terpinggirkan. Dari sinilah seharusnya mereka diberi penghargaan atas prestasi dan jasa-jasanya sejak masa lampau, dan diberi kesempatan untuk mengembangkan segala yang mereka miliki bersama-sama dan bahu-membahu dengan etnis lainnya, asal tidak mengarah pada eksklusivisme dan konservativisme. Hal yang perlu dihapuskan adalah pandangan stereotipe terhadap mereka dan sebaUknya, yang tentu sangat tidak kondusif di masa sekarang dan berpotensi memieue konflik sosial.

4 Kasus Jawa Tengah

Sebagai pusat kebudayaan Jawa, tentu saja orang Jawa merupakan etnis mayoritas di kawasan Jawa Tengah. Sebenarnya ada Juga etnis lain yang berdomisili di kawasan ini terutama di kota-kota, sebab daerah ini merupakan pusat kebudayaan, pendidikan, dan perdagangan. Selain etnis Jawa, etnis lain yang berdomisili di Jawa Tengah dan berjumlah cukup banyak adalah etnis Arab dan Tionghoa, di samping etnis-etnis yang datang dari India, Sumatra, Kalimantan, dan kawasan Indonesia **tinny**. Walaupun etnis **Jawa** merupakan

mayoritas, hubungan antaretnis di kawasan ini cukup harmonis. Hanya, hubungan antara etnis Jawa dan etnis Tionghoa memang tampak kurang harmonis dan cukup sering terjadi konflik sejak masa sejarah hingga terakhir pada Mei 1998, terutama di kota Surakarta dan Semarang. Semua itu disebabkan oleh polkik diskriminatif yang dijalankan pemerintah sejak zaman kolonial hingga Orde Baru.

Tak pelak Jawa Tengah juga terkena imbas politik pemerintah yang keliru di **masa-masa** lampau, khususnya bagi etnis Tionghoa. Munculnya Geger Pacinan di Semarang pada pertengahan abad ke-18 dan peristiwa pada Mei 1998 di Surakarta merupakan bukti konflik besar yang memilukan mereka, di samping konflik-konflik yang lebih kecil tetapi muncul sepanjang masa. Meskipun demikian, mereka tampaknya cukup kuat dan sadar betui serta berani menghadapi risiko-risiko apapun baik tekanan dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, mereka tetap dapat eksis walaupun hanya diberi satu jalan yaitu di bidang ekonomi dan perdagangan yang sebenarnya juga terbatas.

Menyikapi hal di atas, tentunya pandangan yang stereotipe terhadap **etnis** Tionghoa dan sebaliknya itu harus diubah, sebab temyata hanya menghasilkan bumerang bagi semuanya. Di era reformasi sekarang ini, dengan kerangka pendekatan baru, kita harus berani member! penghargaan setinggi-tingginya terhadap kelompok etnis Tionghoa dan menyelenggarakan dialog kebudayaan antaretnis dengan harapan agar mereka akan menghargai kita dan sebaliknya kita juga tidak memandang mereka dengan penuh curiga. Diasumsikan sekarang ini mereka masihberada pada posisi kebingungan, sebab di satu sisi selagi mereka bepergian keluar Jawa Tengah, biasanya mereka menyebut sebagai orang Semarang, orang Solo atau tempat-tempat lain sebagai asalnya di Jawa Tengah, karena memang lahir dan besar di tempat itu. Namun di tempat asalnya itu mereka sering bermasalah dengan lingkungannya.

Berkenaan dengan pendekatan multikulturalisme yang ditawarkan, khususnya di Jawa Tengah, perlu dibuka **dan**

dikembangkan pusat kajian dan kebudayaan Cina, di samping pusat-pusat adat dan agama orang-orang Tionghoa (klenteng) yang telah ada. Dengan pendekatan ini diharapkan bahwa apresiasi budaya pada orang-orang Tionghoa akan berkembang dengan baik yang kemudian dapat mengikis pandangan stereotipe yang selama ini terjadi. Apapun yang terjadi kemudian dengan pendekatan ini dalam bentuk proses akulturasi budaya ataupun asimilasi sekalipun, adalah persoalan di kemudian hari yang tidak dapat dipaksakan. Sebagai contoh misalnya di kawasan Pecinan Semarang dapat didirikan Pusat Kajian dan Kebudayaan Cina, bahkan kawasan ini dapat dijadikan kawasan konservasi (positif) kebudayaan Cina secara fisik (bangunan dan fasilitas) dan kehidupan sosial budaya, sebagai media komunikasi budaya inter dan antaretnis, sebab kawasan ini dekat dengan kawasan Kota Lama dan memang memiliki nilai historis dan kultural. Efek lain dari program ini adalah pemanfaatan komunikasi budaya melalui media pariwisata. Media ini tampaknya mampu menjembatani komunikasi antarbudaya di manapun melalui kegiatan wisata budaya.

Bila kita tengok ke masa lampau sekitar abad ke-15 dan 16, orang-orang Tionghoa ternyata cukup berperan dalam Islamisasi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Bukti-bukti mengenai hal ini cukup banyak dijumpai pada kronik dan peninggalan sejarah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Peranan Cheng Ho dan Mahuan merupakan bukti historis, sedangkan peninggalan seperti klenteng Sam Po Khong, makam puteri Cina, dan berbagai omamen Cina yang ditemukan di Masjid Agung Demak dan masjid-masjid kuno lainnya merupakan bukti-bukti arkeologis. Hubungan politik dan perdagangan Cina-Arab baik melalui darat maupun laut di masa lampau yang secara legendaris disebut dengan "jalur sutera" kiranya telah mendorong Islamisasi di Indonesia. Hubungan yang begitu dekat antara orang-orang Tionghoa dan orang-orang Islam di masa lampau menjadi sangat bertolak belakang dengan apa yang terlihat sekarang, khususnya di Jawa Tengah. Hal ini tentu merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan

pemerintah yang keliru sejak masa sejarah hingga masa sekarang, yang kiranya perlu dicermati bersama-sama untuk selanjutnya diadakan perubahan-perubahan.

Jawa Tengah juga merupakan tempat penyelenggaraan program transmigrasi ke luar Jawa. Berkenaan dengan program hubungan antaretnis dalam format barn, tentunya program ini harus dikaji ulang. Program ini hendaknya tidak hanya dilandaskan pada kemiskinan dan kependudukan. Program hubungan antaretnis yang cukup pelik ini juga harus diberikan kepada para calon transmigran agar perbedaan antaretnis tidak memicu konflik antaretnis di daerah transmigrasi.

5. Simpulan

Politik asimilasi dan diskriminasi etnis di era Orde Baru dan pemerintahan sebelumnya ternyata telah menghasilkan konflik-konflik sosial yang berkepanjangan dan memilukan. Kondisi itu dapat mengancam proses integrasi nasional. Pendekatan multikulturalisme merupakan sebuah tawaran strategis untuk mengubah model pendekatan lain yang pernah ada. Pendekatan ini merupakan model baru yang cukup baik tetapi belum banyak teruji. Oleh karena itu, pemerintah seyogyanya menerapkan politik kebudayaan yang arif dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa himbauan moral, dorongan atau datam bentuk peraturan perundangan yang kondusif. Kalaupun nantinya akan terjadi proses akulturasi atau asimilasi, biarlah proses itu terjadi dengan sendirinya dan tidak perlu dipaksakan.

Dengan menerapkan pendekatan multikulturalisme, kebudayaan-kebudayaan etnis di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, diharapkan dapat berkembang dengan baik, tidak konservatif-eksklusif, dan mampu berkomunikasi dengan baik satu dengan lainnya. Pendekatan multikulturalisme diharapkan juga dapat mendorong munculnya pranata-pranata sosial lainnya untuk mewujudkan bentuk masyarakat madani yang menjunjung tinggi moral, hukum, keadilan, dan HAM.

Khususnya terhadap kelompok etnis

Sabda, l/o/u/ne 8, Ta/wn 20^3; 34-42

Tionghoa, melalui pendekatan **multikulturalisme**, pandangan stereotipe yang selama ini banyak memicu konflik harus **dihapuskan**. Eksistensi etnis ini juga harus **dihargai** dan dihormati, termasuk kehadirannya **sebagai** warga negara. Mereka tentu juga diharapkan akan sepenuhnya menghargai etnis-etnis **lain** di sekitarnya dan mau turut serta **dafam** mendorong terciptanya proses integrasi nasional yang permanen dan mau mendorong terwujudnyamasyarakatmadani di Indonesia. Khususnya di Jawa Tengah yang cukup sarat dengan konflik, khususnya konflik **Jawa-Cina** di sepanjang sejarah, pemerintah daerah dapat menjadi pioner dengan memulai menerapkan pendekatan **multikulturalisme** untuk mengeliminasi konflik dan mengubahnya menjadi hubungan **symbiosis-mutualistik**. Terlepas dari kekurangannya, etnis Tionghoa juga telah banyak berjasa dalam masyarakat Jawa Tengah sejak masa lampau **hinggasekarang**,

DAFTAR PUSTAKA

Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya* (diindonesiakan oleh Nining I. Soesilo). Jakarta: UI-Press.

Cohen, Abner. Editor, 1974. *Urban Ethnicity, London, New York, Sydney: Tavistock Publication,*

Coppel, CharicsA.. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Bisnis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Graaf, H.J, de & Th. Pigeaud, 1998. *Cina Muslim diJawaAbadXVdanXVI; Antara Historisitas dan Mitos, Yogyakarta; Tiara Wacana.*

Greif, Stuart W.. 1991, *WNI; Problematic Orang Indonesia Asal Cina.* Jakarta: Pustaka Utama Graftri,

Harsoyo. 1988. *Pengantar Anmtropologi.* Bandung: BinaCipta.

K o m p a s , "Asimilasionisme vs Muftikulturalisme", Kompas, 14 Maret 2001.

Oetomo, Dede. 1987. *"The Chinese of Pasuruan."* **Dicsertation. Ithaca, Ny: Cornell University.**

Tan Swie Ling. 2000. *"Peran Tionghoa di Indonesia Dahulu dan Sekarang", makalah dalam Seminar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia cS Jakarta.*

Suryadinata, Leo. 1994. *PolWk Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.*

Wimott, Donald E.. 1960. *The Chinese of Semarang: A Changing Minority in Indonesia.* Ithaca: Cornell University **Press.**

Wiriadinata, Debora. 1998. *Chinese Indonesian Dilemma: The Younger Generation of Chinese Indonesia, Search for Identity. Ohio: Ohio University.*

